

## INTERVENSI DAN INSTRUMEN KEBIJAKAN UNTUK PARIWISATA BERKELANJUTAN DI KOTA TARUTUNG

Johannes Parera<sup>1</sup>, Rotua Br Purba<sup>2</sup>, Dinda Nesa Gamaliel Br Silitonga<sup>3</sup>, Puspa Wahyu Pratiwi<sup>4</sup>, Alvius Wau<sup>5</sup>

[Pareraannes@gmail.com](mailto:Pareraannes@gmail.com)<sup>1</sup>, [rotuapurba636@gmail.com](mailto:rotuapurba636@gmail.com)<sup>2</sup>, [dindanesa.g.silitonga11@gmail.com](mailto:dindanesa.g.silitonga11@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[Puspamananalulu8@gmail.com](mailto:Puspamananalulu8@gmail.com)<sup>4</sup>, [alviuswau45@gmail.com](mailto:alviuswau45@gmail.com)<sup>5</sup>

IAKN Tarutung

### ABSTRAK

Tujuan untuk memahami jenis intervensi pemerintah serta alat kebijakan yang diterapkan dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan di Kota Tarutung. Pengembangan industri pariwisata menjadi salah satu langkah krusial untuk mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah serta meningkatkan kesejahteraan penduduk. Tarutung memiliki banyak potensi wisata, termasuk pariwisata religius, warisan budaya Batak dan keindahan alam yang bisa dikembangkan secara berkelanjutan. Namun, kemajuan sektor pariwisata juga bisa menyebabkan sejumlah masalah, seperti kerusakan lingkungan, pengelolaan destinasi yang kurang efisien, serta dukungan masyarakat yang minim jika tidak dikelola dengan baik. Oleh sebab itu, peran pemerintah sangat diperlukan melalui kebijakan yang tepat untuk mendukung terwujudnya pariwisata yang berkelanjutan. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis dilakukan dengan menggunakan teori instrumen kebijakan dari Christopher Hood melalui konsep NATO (Nodality, Authority, Treasure, Organization), teori pariwisata berkelanjutan, serta pendekatan pemerintahan kolaboratif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah melaksanakan beragam inisiatif untuk mendukung perkembangan pariwisata, seperti penyusunan regulasi, pembangunan infrastruktur wisata, pemasaran destinasi, serta pemberdayaan komunitas lokal melalui kegiatan UMKM dan kelompok sadar wisata. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan, melestarikan budaya setempat dan mendukung kegiatan pariwisata juga berkontribusi pada keberlanjutan destinasi wisata di Kota Tarutung. Meskipun demikian, pengelolaan pariwisata masih menghadapi beberapa tantangan, seperti kurangnya infrastruktur, pengelolaan sampah yang belum optimal dan rendahnya kesadaran sebagian masyarakat mengenai pentingnya pariwisata yang berkelanjutan.

**Kata Kunci:** Intervensi, Instrument, Kebijakan, Pariwisata, Tarutung.

### ABSTRACT

*This study aims to understand the types of government interventions and policy tools implemented in the development of sustainable tourism in Tarutung City. Developing the tourism industry is a crucial step in driving regional economic growth and improving the welfare of its residents. Tarutung has a wealth of tourism potential, including religious tourism, Batak cultural heritage, and natural beauty that can be developed sustainably. However, the advancement of the tourism sector can also lead to a number of problems, such as environmental damage, inefficient destination management, and minimal community support if not managed properly. Therefore, the government's role is crucial through appropriate policies to support the realization of sustainable tourism. The methodology used in this study is qualitative, with data collection techniques through interviews, observation, and documentation. Analysis was conducted using Christopher Hood's theory of policy instruments through the NATO concept (Nodality, Authority, Treasure, Organization), sustainable tourism theory, and a collaborative governance approach. The research findings indicate that the local government has implemented various initiatives to support tourism development, such as the development of regulations, tourism infrastructure development, destination marketing, and empowering local communities through MSME activities and tourism awareness groups. In addition, community participation in maintaining environmental cleanliness, preserving local culture, and supporting tourism activities also contributes to the sustainability of tourist destinations in Tarutung City. However, tourism management still faces several challenges, such as a lack of infrastructure, suboptimal waste management, and low awareness among some residents about the importance of*

*sustainable tourism.*

**Keywords:** *Intervention, Instrument, Policy, Tourism, Tarutung.*

## **PENDAHULUAN**

Pariwisata merupakan sektor penting dalam pembangunan daerah, sebab dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan kerja dan meningkatkan taraf hidup masyarakat lokal. Di era pembangunan yang modern ini, fokus pada pengembangan pariwisata bukan hanya pada peningkatan jumlah pengunjung, tetapi juga harus memperhatikan aspek keberlanjutan. Berdasarkan pendapat World Tourism Organization, pariwisata yang berkelanjutan memerlukan keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial dan lingkungan guna memastikan manfaatnya untuk generasi sekarang dan mendatang. Kota Tarutung, yang merupakan ibu kota Kabupaten Tapanuli Utara, memiliki beragam potensi wisata—termasuk pariwisata religius dan budaya Batak, hingga objek alam seperti pemandian air panas. Keanekaragaman ini menjadikan Tarutung salah satu tujuan wisata yang tengah berkembang di Sumatera Utara. Namun, jika tidak ditangani dengan baik, perkembangan pariwisata dapat menimbulkan masalah seperti kerusakan lingkungan, ketidakmerataan distribusi pendapatan dan rendahnya partisipasi masyarakat.

Dalam situasi tersebut, intervensi dari pemerintah menjadi sangat penting. Pemerintah daerah berfungsi sebagai pengatur, fasilitator dan pendorong untuk memastikan bahwa pengembangan pariwisata sejalan dengan prinsip keberlanjutan. Intervensi ini bisa dilakukan melalui berbagai instrumen kebijakan, seperti regulasi, alokasi anggaran, pembentukan lembaga pengelola dan program peningkatan kapasitas masyarakat. Menurut teori instrumen kebijakan yang dikemukakan oleh Christopher Hood, pemerintah memiliki empat jenis instrumen utama: otoritas (kewenangan/regulasi), keuangan (anggaran), nodalitas (informasi) dan organisasi (kelembagaan). Keberhasilan implementasi kebijakan pariwisata yang berkelanjutan sangat dipengaruhi oleh efektivitas penggunaan instrumen-instrumen ini. Selain itu, pengelolaan pariwisata modern memerlukan pendekatan yang kolaboratif. Konsep tata kelola kolaboratif yang dikembangkan oleh Bill Bramwell menekankan pentingnya keterlibatan berbagai aktor—pemerintah, masyarakat dan pelaku usaha—dalam pengelolaan destinasi. Berdasarkan penjabaran tersebut, diperlukan penelitian untuk menganalisis jenis intervensi yang dilakukan oleh pemerintah serta instrumen kebijakan yang diterapkan untuk mendukung pariwisata yang berkelanjutan di Kota Tarutung.

## **METODE PENELITIAN**

Dalam studi ini, metode kualitatif digunakan. Data diperoleh melalui berbagai cara seperti observasi, wawancara dan pengumpulan dokumen. Para partisipan yang terlibat dalam penelitian ini adalah individu yang bekerja di bidang pemerintahan. Proses pengolahan data dilakukan melalui wawancara dan observasi, memberikan peneliti kesempatan untuk memperoleh informasi yang mendalam dari wawancara tersebut. Analisis data dilakukan dengan menyaring dan menjabarkan hasil wawancara dengan narasumber. Peneliti berfungsi sebagai instrumen utama dalam proses pengumpulan data. Fokus utama dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi intervensi dan instrumen kebijakan dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan, terutama di kota Tarutung. Pada penelitian ini, peneliti mengapa tiga metode dalam pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Proses observasi dilakukan untuk melihat secara langsung intervensi dan instrumen yang mendukung keberlanjutan pariwisata, terutama di Tarutung. Kegiatan ini meliputi observasi dan pencatatan terstruktur terhadap peristiwa, perilaku dan objek yang diamati. Selama observasi, peneliti mencatat informasi penting yang terkait dengan panduan observasi yang telah disiapkan sebelumnya.

Wawancara dilakukan dengan narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi terkait pelaksanaan intervensi dan instrumen, sedangkan dokumentasi berfungsi sebagai sumber bukti tambahan untuk penelitian ini. Proses pemilihan peserta dilakukan dengan teknik yang dirancang untuk individu-individu yang dianggap mampu memberikan pandangan yang tepat dan dapat diandalkan mengenai topik penelitian ini.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hasil dari studi ini menunjukkan bahwa Teori kebijakan publik adalah aspek krusial dalam administrasi publik dan politik, terkait dengan cara pemerintah merancang, menetapkan, melaksanakan dan menilai kebijakan yang bertujuan untuk mengatasi masalah di masyarakat. Kebijakan publik tidak hanya diartikan sebagai keputusan resmi yang diambil oleh pemerintah, tetapi juga meliputi tindakan konkret dan sikap pemerintah dalam menyikapi tantangan yang ada dalam komunitas. Dari perspektif akademik, keberadaan kebijakan publik muncul sebagai reaksi terhadap problematika yang dihadapi masyarakat yang memerlukan campur tangan pemerintah. Permasalahan ini bisa beragam, mencakup berbagai isu seperti ekonomi, sosial, lingkungan, pendidikan dan sektor pariwisata. Oleh karena itu, teori kebijakan publik berfungsi sebagai alat untuk menganalisis dan memahami proses serta konsekuensi dari kebijakan yang diterapkan. Sementara itu, menurut Thomas R. Dye, kebijakan publik mencakup segala sesuatu yang diputuskan oleh pemerintah untuk dijalankan atau diabaikan. Penjelasan ini menyoroti bahwa kebijakan tidak selalu harus berbentuk tindakan langsung; keputusan untuk tidak melakukan sesuatu juga bisa dianggap sebagai suatu kebijakan, asalkan diambil dengan pertimbangan yang bijaksana dan mempengaruhi masyarakat.

Dalam teori tentang kebijakan publik, terdapat langkah-langkah atau proses yang dikenal sebagai siklus kebijakan. Langkah-langkah ini terdiri dari:

1. Penyusunan Agenda. Langkah pertama dalam mengembangkan kebijakan adalah merencanakan agenda. Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, kebijakan dibentuk sebagai reaksi pemerintah terhadap tantangan yang terdapat dalam masyarakat. Dengan diterapkannya kebijakan baru, diharapkan dapat menyelesaikan masalah yang ada. Realitas sosial saat ini menunjukkan bahwa berbagai tantangan semakin kompleks dan jumlahnya semakin banyak. Jika dibandingkan dengan sumber daya yang tersedia di 34 Kebijakan Publik pemerintah serta waktu yang ada untuk menjalankan kegiatan, tidak semua masalah bisa terpecahkan secara bersamaan. Kondisi ini mengakibatkan beragam isu bersaing untuk mendapat perhatian dan dukungan dari para pembuat kebijakan, sehingga kemudian masuk dan ditetapkan dalam agenda kebijakan yang akan dibahas lebih lanjut oleh aktor-aktor tersebut.
2. Formulasi Kebijakan. Setelah isu atau masalah dimasukkan ke dalam agenda kebijakan oleh para aktor yang memformulasikannya, tahap selanjutnya adalah merumuskan kebijakan. Dalam fase ini, definisi kebijakan akan menetapkan alternatif yang dapat diambil untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Dibutuhkan suatu proses yang disebut ramalan untuk menilai potensi dampak atau konsekuensi yang mungkin timbul dari setiap alternatif kebijakan yang diterapkan.
3. Persetujuan Kebijakan. Pada tahap ini, para pengambil keputusan berusaha untuk menentukan kebijakan dengan dukungan dari beragam pihak. Proses ini ditetapkan setelah ada usulan kebijakan yang diajukan. Persetujuan kebijakan merupakan tahap yang menegaskan pilihan alternatif kebijakan yang akan diambil untuk diimplementasikan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada.
4. Implementasi Kebijakan. Tahap ini sangat krusial karena implementasi merupakan kegiatan yang dinamis yang melibatkan berbagai tindakan pemanfaatan sumber daya,

yang pada akhirnya diharapkan dapat memberikan hasil yang sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan dalam proses pembuatan kebijakan tersebut.

Proses ini menunjukkan bahwa kebijakan publik bersifat fleksibel dan berlanjut, karena hasil penilaian bisa dijadikan landasan untuk perbaikan kebijakan di masa depan. Berdasarkan langkah-langkah tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa proses kebijakan publik merupakan serangkaian kegiatan yang terstruktur dari identifikasi isu hingga penilaian kebijakan. Dalam penelitian ini, konsep proses kebijakan publik dipakai untuk memahami bagaimana pemerintah daerah merumuskan, melaksanakan, serta menilai kebijakan yang berkaitan dengan pengembangan pariwisata yang berkelanjutan di Kota Tarutung.

Dengan berbagai model kebijakan: 1. Pendekatan rasional, yang menjelaskan bahwa kebijakan dipahami sebagai hasil dari analisis yang logis dan terstruktur untuk mencapai hasil optimal dengan biaya terendah. 2. Pendekatan inkremental, yang mengindikasikan bahwa kebijakan biasanya berkembang secara bertahap melalui perubahan kecil dari kebijakan yang sudah ada, sehingga tidak selalu mengalami perubahan besar dalam waktu singkat. 3. Pendekatan kelembagaan, yang menekankan bahwa kebijakan publik dipengaruhi secara signifikan oleh struktur, wewenang, serta peran lembaga pemerintah dalam proses pengambilan keputusan. 4. Pendekatan kelompok, yang memandang kebijakan sebagai hasil dari interaksi, negosiasi dan kompromi antara berbagai kelompok kepentingan yang ada dalam masyarakat. 5. Pendekatan-pendekatan ini memberikan pemahaman kepada peneliti mengenai bagaimana sebuah kebijakan berkembang serta faktor-faktor yang berperan dalam proses pembentukannya.

Upaya untuk menggabungkan pengelolaan risiko dalam kebijakan publik merupakan tindakan strategis yang bertujuan untuk menjamin bahwa pembangunan negara dilaksanakan dengan metodologi yang efisien, efektif dan adil. Signifikansi pengelolaan risiko dalam kebijakan publik semakin terlihat jelas ketika dianalisis melalui pendekatan SWOT (Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman). Dengan melakukan analisis SWOT, kita dapat menemukan keunggulan (kekuatan) yang dimiliki pemerintah dalam merancang dan menerapkan kebijakan, serta masalah (kelemahan) yang harus diatasi. Dalam konteks ini, pengelolaan risiko memainkan peran penting dalam menjelaskan kemungkinan tantangan (ancaman) dan kesempatan (peluang) yang dapat mempengaruhi keberhasilan kebijakan publik.

1. Kekuatan: Pengelolaan risiko memainkan peranan penting bagi pemerintah dalam mengoptimalkan semua potensi yang ada demi menciptakan kebijakan yang lebih baik dan aman. Dengan mengenali elemen-elemen internal yang mendukung pencapaian sasaran kebijakan, seperti kemampuan Sumber Daya Manusia dan teknologi, pengelolaan risiko dapat memaksimalkan pemanfaatan kekuatan ini untuk menangani kemungkinan risiko yang dapat menghalangi pelaksanaan kebijakan.
2. Kelemahan: Di sisi lain, analisis SWOT juga mengidentifikasi kelemahan dalam pelaksanaan kebijakan. Tanpa adanya pengelolaan risiko yang efektif, kelemahan ini dapat memperburuk situasi dan menghambat pencapaian sasaran kebijakan. Misalnya, kurangnya koordinasi di antara berbagai lembaga pemerintah atau keterbatasan sumber daya dapat memperparah dampak dari risiko yang ada. Pengelolaan risiko memberikan peluang untuk membuat kebijakan lebih tanggap terhadap perubahan internal, memperbaiki kelemahan yang ada, serta memperkuat sistem manajemen risiko untuk mengurangi konsekuensi negatif.
3. Kesempatan: Pengelolaan risiko juga memainkan peran penting dalam menemukan kesempatan yang ada. Kebijakan publik yang berkaitan dengan peluang potensial, seperti kemajuan teknologi atau kerjasama internasional, dapat dioptimalkan dengan pendekatan manajemen risiko. Dengan strategi yang lebih proaktif, pemerintah bisa lebih

cerdas dan lebih aman dalam mengeksplorasi kesempatan tersebut, sekaligus menghindari potensi risiko yang mungkin muncul akibat perubahan yang tidak terduga.

4. Bahaya: Salah satu elemen utama dalam analisis SWOT adalah mengidentifikasi bahaya. Manajemen risiko mendukung pemerintah untuk mengenali ancaman yang bisa berdampak pada stabilitas sosial, ekonomi dan politik. Sebagai contoh, risiko yang berhubungan dengan bencana alam, perubahan ekonomi, atau ketegangan sosial dapat dikurangi melalui kebijakan yang lebih terencana dan didasarkan pada analisis risiko yang komprehensif.

Teori kebijakan publik sangat penting untuk menilai peran pemerintah daerah dalam mengelola industri pariwisata. Mengingat sektor ini menjadi penggerak utama bagi pembangunan daerah, pariwisata membawa berbagai tantangan, termasuk pengelolaan lingkungan, distribusi manfaat ekonomi, partisipasi masyarakat dan koordinasi antar pengelola destinasi. Kondisi ini menegaskan bahwa pengembangan pariwisata tidak dapat berjalan sendiri tanpa adanya perencanaan dan pengaturan yang jelas dari pemerintah. Dengan demikian, kebijakan publik menjadi sangat vital sebagai panduan untuk mengatur, membimbing dan mengawasi perkembangan pariwisata agar dapat berlangsung dengan prinsip keberlanjutan.

Untuk menjamin kelancaran implementasi kebijakan, diseminasi yang efisien sangatlah diperlukan. Ada empat syarat yang harus dipenuhi dalam pengelolaan diseminasi kebijakan, yaitu:

- (1) penghargaan masyarakat terhadap otoritas pemerintah untuk menjabarkan kewajiban moral dalam mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak yang berwenang.
- (2) Terdapat kesadaran untuk menerima kebijakan. Rasa ingin dan kesadaran untuk menerima serta menjalankan kebijakan akan muncul ketika kebijakan tersebut dianggap rasional;
- (3) Keyakinan bahwa kebijakan tersebut dibuat secara resmi;
- (4) Awalnya kebijakan dianggap sebagai topik yang diperdebatkan, namun seiring waktu, kebijakan ini dapat diterima sebagai hal yang wajar.

Teori Intervensi Pemerintah dalam Pariwisata mengacu pada konsep yang menjelaskan peran dan keterlibatan pemerintah dalam mengatur, mengarahkan dan mengontrol kemajuan sektor pariwisata agar selaras dengan tujuan pembangunan, baik dari perspektif ekonomi, sosial, budaya, maupun lingkungan. Secara umum, partisipasi pemerintah dalam pariwisata sangat penting, karena sektor ini tidak sepenuhnya dapat diserahkan kepada mekanisme pasar. Tanpa campur tangan pemerintah, sektor pariwisata dapat menimbulkan akibat-akibat negatif seperti kerusakan lingkungan, ketidakadilan ekonomi, eksploitasi budaya lokal, serta potensi konflik sosial yang bisa terjadi.

Menurut Bill Bramwell, peran pemerintah dalam sektor pariwisata sangat vital untuk memastikan bahwa perkembangan pariwisata terjadi dengan cara yang berkelanjutan. Pemerintah memiliki tanggung jawab utama dalam menciptakan kebijakan, mengatur peraturan, merencanakan destinasi dan mengkoordinasi berbagai pemangku kepentingan yang terlibat.

### **Jenis Intervensi**

Intervensi dapat diklasifikasikan ke dalam jenis yang berbeda berdasarkan beberapa kriteria. Di bawah ini adalah beberapa kategori umum dari berbagai jenis intervensi.

1. Berdasarkan Bidang
  - a. Intervensi Politik

Intervensi politik terjadi ketika suatu negara atau organisasi internasional ikut campur dalam urusan politik negara lain. Hal ini mungkin melibatkan dukungan terhadap kelompok oposisi, penerapan sanksi ekonomi, atau tindakan militer. Misalnya saja partisipasi Amerika

Serikat di Irak pada tahun 2003.

b. Intervensi Ekonomi

Intervensi ekonomi mengacu pada langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah atau lembaga keuangan untuk mempengaruhi pasar atau kondisi ekonomi. Hal ini mungkin mencakup kebijakan moneter, menawarkan subsidi, atau membuat perjanjian perdagangan. Misalnya, bank sentral mengatur pasar valuta asing untuk menjaga kestabilan nilai tukar mata uang.

c. Intervensi Sosial

Intervensi sosial adalah upaya terencana untuk mengubah atau memperbaiki situasi sosial tertentu. Hal ini dapat berupa program pengentasan kemiskinan, kampanye kesadaran masyarakat, atau inisiatif pemberdayaan masyarakat.

d. Intervensi Kesehatan

Dalam bidang kesehatan, intervensi adalah tindakan atau program medis yang dirancang untuk mencegah, mengobati, atau menangani masalah kesehatan tertentu. Contohnya termasuk program vaksinasi massal, terapi obat dan kampanye kesehatan masyarakat.

2. Berdasarkan Skala

a. Intervensi Mikro

Intervensi mikro fokus pada individu atau kelompok kecil. Dalam pekerjaan sosial, hal ini mungkin melibatkan konseling pribadi atau sesi terapi keluarga. Dalam perawatan kesehatan, ini berkonsentrasi pada perawatan pasien individu.

b. Intervensi Mezzo

Intervensi mezzo melibatkan kelompok atau badan organisasi yang lebih besar. Contohnya termasuk program intervensi di sekolah atau tempat kerja, serta inisiatif pengembangan masyarakat lokal.

c. Intervensi Makro

Intervensi makro dilakukan dalam skala yang lebih besar, mencakup tingkat komunitas, nasional, atau global. Hal ini mungkin melibatkan perubahan kebijakan nasional, upaya kesadaran masyarakat berskala besar, atau inisiatif global seperti program PBB untuk pembangunan berkelanjutan.

3. Berdasarkan Pendekatan yang digunakan

Intervensi Langsung. Pendekatan ini mengambil tindakan langsung pada sasaran intervensi. Di dunia medis, contohnya adalah operasi atau pemberian obat. Sementara dalam ranah sosial, ini bisa berupa pemberian bantuan langsung kepada individu atau keluarga yang sedang menghadapi kesulitan.

Intervensi Tidak Langsung: Pendekatan ini bekerja melalui perantara atau dengan mengubah lingkungan serta sistem yang memengaruhi sasaran. Contohnya adalah program edukasi yang bertujuan mencegah penyakit, atau penyesuaian kebijakan untuk mengatasi berbagai persoalan sosial

4. Berdasarkan Tujuan Intervensi

Intervensi Preventif: Fokusnya adalah mencegah timbulnya masalah. Ini bisa diwujudkan melalui program vaksinasi untuk mencegah penyakit, atau kampanye edukasi yang mendorong masyarakat untuk menjauhi perilaku berisiko.

Intervensi Kuratif: Tujuannya adalah menangani masalah yang sudah terjadi. Dalam bidang kesehatan, ini mencakup pengobatan penyakit. Di ranah sosial, contohnya adalah program rehabilitasi bagi pecandu narkoba.

Intervensi Promotif: Pendekatan ini berupaya meningkatkan kesejahteraan atau kemampuan yang sudah dimiliki. Contohnya adalah program pengembangan keterampilan atau upaya-upaya yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup.

## **Tujuan Intervensi**

Intervensi berarti mengambil langkah untuk menghentikan atau mengubah perilaku seseorang. Tujuan intervensi adalah untuk memberikan dukungan dan bantuan kepada individu atau kelompok yang ingin mengubah perilaku mereka, yang pada akhirnya berharap untuk mencapai hasil positif dan meningkatkan kesejahteraan mental atau fisik mereka.

Ada beberapa sasaran intervensi yang spesifik, seperti mengubah kebiasaan negatif yang berdampak pada kesehatan. Misalnya saja merokok atau minum minuman beralkohol. Mendorong orang tua untuk lebih berpartisipasi dalam pendidikan anak-anaknya. Misalnya, program intervensi keluarga membantu orang tua mendidik anak mereka tentang kesehatan reproduksi. Meningkatkan kemampuan dan potensi pribadi. Misalnya, menawarkan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan sosial atau konseling karir untuk meningkatkan keterampilan kerja. Ketika menerapkan intervensi, tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan individu atau kelompok. Dengan menawarkan dukungan dan bantuan yang tepat, intervensi dapat memungkinkan masyarakat mencapai tujuan mereka dan mencegah masalah yang timbul dari tindakan negatif atau keadaan yang menantang. Oleh karena itu, mengambil tindakan merupakan langkah awal yang penting untuk membantu masyarakat meningkatkan kesehatan dan kualitas hidup mereka secara keseluruhan.

## **Bentuk Intervensi Pemerintah di Bidang Pariwisata:**

- **Regulasi.**

Regulasi adalah jenis intervensi pemerintah yang melibatkan pembuatan undang-undang, peraturan dan kebijakan untuk mengawasi kegiatan pariwisata. Peraturan dirancang untuk menjamin kejelasan hukum, menegakkan ketertiban, melindungi wisatawan dan penduduk lokal dan menjamin bahwa bisnis pariwisata beroperasi sesuai dengan standar yang ditetapkan. Contohnya seperti ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan.

- **Perencanaan**

Perencanaan adalah upaya pemerintah untuk membuat rencana strategis atau induk pengembangan pariwisata, memastikan pertumbuhan terarah, terpadu dan berkelanjutan. Perencanaan ini biasanya dirinci dalam dokumen seperti Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 yang mencakup Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Nasional (RIPPARNAS).

- **Pengawasan**

Pengawasan mengacu pada upaya pemerintah dalam mengendalikan dan memantau kegiatan pariwisata untuk mencegah dampak negatif terhadap lingkungan, masyarakat dan budaya. Pengawasan dilakukan melalui evaluasi, pemeriksaan dan pemberian sanksi apabila ditemukan pelanggaran.

- **Fasilitasi**

Fasilitasi melibatkan pemerintah dalam memberikan dukungan melalui pembangunan infrastruktur seperti jalan, bandara dan pelabuhan, promosi destinasi, pelatihan sumber daya manusia dan fasilitas terkait pariwisata.

- **Insentif dan Disinsentif.**

Insentif dan disinsentif merupakan kebijakan pemerintah yang dirancang untuk mendorong atau membatasi kegiatan pariwisata tertentu. Insentif dapat berupa keringanan pajak, subsidi, atau penyederhanaan perizinan untuk menarik investasi. Untuk menjaga lingkungan dan masyarakat, disinsentif diterapkan melalui pembatasan usaha, pajak yang tinggi, atau larangan kegiatan tertentu.

Penerapan kebijakan merupakan fase dalam siklus kebijakan di mana keputusan yang telah ditetapkan diubah menjadi aksi nyata untuk meraih sasaran yang diinginkan. Tahapan ini meliputi pelaksanaan program, aktivitas dan langkah-langkah operasional yang dirancang

untuk membuahkan dampak yang diharapkan. Sesuai dengan teori implementasi kebijakan, tahap ini berlangsung melalui serangkaian proses yang rumit, termasuk penyusunan rencana, distribusi asal daya, kolaborasi antarinstansi, komunikasi yang tepat, pemberdayaan pihak terkait, pengawasan, serta penilaian. Elemen-elemen seperti struktur organisasi, kemampuan administrasi, ketersediaan sumber daya, dukungan politik dan dinamika sosial turut berdampak pada pelaksanaan kebijakan.

Beberapa prinsip utama yang perlu diperhatikan dalam implementasi kebijakan meliputi:

1. Kesesuaian: Pelaksanaan kebijakan harus sejalan dengan tujuan dan maksud yang telah ditetapkan. Kebijakan yang berlaku perlu sesuai dengan kebutuhan dan situasi masyarakat yang menjadi target.
2. Kolaborasi dan Kemitraan: Keberhasilan implementasi kebijakan tergantung pada kolaborasi antara beragam pemangku kepentingan. Mengikutsertakan semua pihak yang sesuai dalam proses pelaksanaan dapat menaikkan efektivitas dan efisiensi kebijakan.
3. Partisipasi Publik: Melibatkan masyarakat dalam implementasi kebijakan menjadi elemen yang penting. Keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan dapat menguatkan legitimasi dan dukungan terhadap kebijakan tersebut.
4. Koordinasi dan Sinergi: Pelaksanaan kebijakan yang berdaya guna memerlukan koordinasi yang baik di antara berbagai lembaga serta sektor yang berhubungan. Koordinasi yang efektif dapat mencegah tumpang tindih, meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan memperkuat pengaruh positif kebijakan.
5. Kapasitas Institusional: Keberhasilan penerapan kebijakan memerlukan kapasitas institusi yang memadai. Lembaga-lembaga yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan harus mempunyai SDM, keahlian dan keterampilan yang dibutuhkan untuk melaksanakan kebijakan dengan baik.

Teori Alat Kebijakan merupakan gagasan yang menggambarkan bahwa pemerintah memanfaatkan berbagai alat atau alat ukur tertentu untuk menerapkan kebijakan dengan tujuan agar sasaran yang ditentukan dapat dicapai secara efisien. Ini berarti, kebijakan tidak hanya sebatas dokumen tertulis, tetapi harus dilaksanakan melalui alat dan cara kerja yang nyata.

Teori dan model penerapan kebijakan publik dalam dunia akademis, penggunaan teori mempunyai fungsi yang sangat krusial. Teori berfungsi sebagai fondasi untuk semua aktivitas di dalam tahapan belajar mengajar. Griffiths menurut Zauhar mengemukakan bahwa secara mendasar teori adalah kumpulan asumsi, yang dari asumsi tersebut dapat diturunkan seperangkat hukum yang bersifat empirik. Teori tidak dapat diverifikasi melalui eksperimen langsung, akan tetapi dijumpai model-model atau cara yang mampu menguraikan teori tersebut. Dalam bidang administrasi, terutama terkait dengan kebijakan publik, eksistensi teori juga sangat mendasar. Zauhar menjelaskan mengenai fungsi dari teori administrasi: 1) Petunjuk untuk bertindak, 2) Mengumpulkan informasi, 3) Mendapatkan wawasan baru, 4) Menguraikan karakteristik administrasi. Hubungan antara teori dan model mempunyai koneksi yang kuat. Mengingat teori itu bersifat konseptual, maka dibutuhkan model atau cara untuk memaparkannya. Penulis meyakini bahwa model adalah perwakilan simbolis dari suatu objek, tahapan sistem, atau ide. Model bisa berupa ilustrasi grafis, deskripsi verbal, atau notasi matematis. Kaitan antara teori dan model diperkuat oleh pandangan Werner J. Severin dan James W. Tankard, Jr. "Model berfungsi untuk merumuskan sebuah teori dan mengindikasikan hubungan.

Pengertian teori alat ukur kebijakan dalam konteks pariwisata: Salah satu orang yang dikenal dalam teori instrumen kebijakan adalah Christopher Hood. Dia mengungkapkan bahwa pemerintah mempunyai empat kategori instrumen utama yang disebut gagasan NATO (Nodality, Authority, Treasure, Organization). Berikut adalah penjelasannya dalam konteks

pengelolaan pariwisata di daerah:

1. Nodality (Informasi)

Pemerintah memanfaatkan informasi sebagai cara kebijakan, termasuk sosialisasi peraturan daerah, promosi tempat wisata, publikasi data kunjungan wisatawan, serta menyajikan penyuluhan kepada pelaku usaha dan masyarakat. Dalam riset ini, instrumen nodality terlihat dari sejauh mana Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara melalui Dinas Pariwisata aktif dalam menyebarkan informasi dan program pengembangan pariwisata di Kota Tarutung.

2. Authority (Kewenangan/Regulasi)

Instrumen berupa kewenangan hukum untuk membuat dan menerapkan aturan, seperti Peraturan Daerah (Perda), Peraturan Bupati, izin usaha pariwisata dan standar operasional destinasi. Dalam studi ini, instrumen authority dapat dianalisis melalui adanya regulasi daerah yang mengatur pengelolaan dan pengembangan pariwisata di Kota Tarutung.

3. Treasure (Keuangan/Anggaran)

Instrumen yang menyangkut penggunaan asal daya keuangan, seperti alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), subsidi, bantuan untuk pengembangan destinasi dan dukungan dana untuk promosi wisata. Ini berhubungan dengan sejauh mana pemerintah daerah menyediakan dukungan finansial untuk mewujudkan pariwisata yang berkelanjutan.

4. Organization (Organisasi/Struktur)

Instrumen yang berhubungan dengan pembentukan lembaga atau struktur organisasi yang bertanggung jawab dalam pengelolaan pariwisata, seperti Dinas Pariwisata, unit pengelola destinasi, atau kelompok sadar wisata (Pokdarwis). Dalam penelitian ini, instrumen organization dipakai untuk mengkaji siapa saja aktor yang terlibat dan bagaimana pembagian peran dalam pengelolaan destinasi.

Teori Pengelolaan Destinasi Pariwisata merujuk kepada kerangka kerja yang menguraikan cara merancang, mengurus, mengawasi dan memperluas sebuah tempat wisata secara terpadu untuk memberikan kegunaan secara berkelanjutan dalam aspek ekonomi, sosial dan lingkungan. Secara luas, manajemen destinasi tidak hanya berfokus pada aspek promosi atau kenaikan jumlah pengunjung, tetapi juga meliputi: Rencana tata ruang dan pemetaan zona bagi destinasi, pengelolaan kapasitas lingkungan, kolaborasi antara beragam pihak berkepentingan (pemerintah, masyarakat, sektor swasta), pengembangan sarana dan prasarana, pengendalian pengaruh sosial dan lingkungan, serta strategi pemasaran untuk destinasi tersebut.

Dalam Teori Pengelolaan Destinasi Pariwisata (Destination Management)

a. Teori Siklus Hidup Destinasi

Teori Siklus Hidup Destinasi dapat dipahami sebagai kerangka analisis untuk melihat posisi perkembangan suatu destinasi wisata berdasarkan tahap-tahap pertumbuhannya, sehingga dapat ditentukan strategi pengelolaan yang sesuai agar destinasi tetap berkelanjutan. Menurut Butler, teori Siklus Hidup Destinasi Pariwisata (TALC) diperkenalkan pada tahun 1980. Butler menyatakan bahwa setiap lokasi wisata akan melewati berbagai fase perkembangan yang dikenal sebagai siklus hidup destinasi. Fase-fase tersebut terdiri dari:

1. Eksplorasi: Lokasi masih sangat alami, dengan jumlah pengunjung yang sedikit dan fasilitas yang sangat minim.
2. Keterlibatan: Komunitas mulai berperan aktif dalam penyediaan fasilitas dasar.
3. Pengembangan: Munculnya peningkatan investasi, promosi yang gencar dan lonjakan jumlah pengunjung.
4. Konsolidasi: Pariwisata menjadi sektor yang dominan dengan jumlah pengunjung yang tinggi.
5. Kejenuhan: Kunjungan mencapai titik tertinggi, menghadirkan tantangan seperti

kepadatan dan kerusakan lingkungan.

6. Penurunan atau Peremajaan: Destinasi dapat mengalami penurunan atau diperbarui melalui inovasi yang baru.

b. Teori Perencanaan dan Pengelolaan Destinasi

Teori Perencanaan dan Pengelolaan Destinasi Pariwisata merujuk kepada prinsip yang menjelaskan bahwa pengembangan lokasi wisata perlu dilakukan melalui langkah-langkah perencanaan yang teratur, holistik dan berkelanjutan agar dapat memberikan keuntungan ekonomi sekaligus menjaga kelestarian lingkungan dan struktur sosial masyarakat. Konsep ini banyak diperkenalkan oleh Edward Inskeep yang menegaskan bahwa perencanaan dalam pariwisata harus dilakukan secara komprehensif (perencanaan terintegrasi), bukan hanya tertuju pada peningkatan jumlah pengunjung, tetapi juga memperhatikan: Perencanaan tata wilayah, pengelolaan kapasitas lingkungan, partisipasi masyarakat, koordinasi antar lembaga, serta aturan dan kebijakan yang jelas. Inskeep menggarisbawahi bahwa tanpa langkah perencanaan yang tepat, sebuah destinasi berpeluang untuk menghadapi: kepadatan yang berlebihan, kerusakan pada lingkungan, sengketa sosial dan ketidakadilan ekonomi. Dalam konteks penelitian ini, konsep pariwisata berkelanjutan digunakan untuk menganalisis apakah intervensi dan instrumen kebijakan yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara telah memperhatikan keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial dan lingkungan dalam pengelolaan destinasi di Kota Tarutung.

Teori Pariwisata Berkelanjutan menekankan bahwa pengembangan pariwisata harus memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhannya. Konsep ini menyeimbangkan aspek lingkungan, sosial dan ekonomi dalam pengelolaan destinasi wisata. Konsep pariwisata berkelanjutan banyak dikembangkan oleh World Tourism Organization yang menyatakan bahwa pariwisata berkelanjutan harus mampu mengoptimalkan manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal, menghormati keaslian sosial dan budaya masyarakat setempat, serta menjaga kelestarian lingkungan dan sumber daya alam. Prinsip ini menekankan bahwa kegiatan pariwisata tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi semata, tetapi juga harus memperhatikan dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan. Selain itu, menurut David Weaver, pariwisata berkelanjutan merupakan pendekatan pembangunan pariwisata yang mengintegrasikan tiga dimensi utama yaitu keberlanjutan ekonomi, keberlanjutan sosial budaya dan keberlanjutan lingkungan. Weaver menekankan bahwa keberhasilan pengembangan pariwisata sangat bergantung pada kemampuan pengelola destinasi dalam menjaga keseimbangan antara ketiga aspek tersebut.

Fokus utama Teori Pariwisata berkelanjutan adalah upaya menjaga keseimbangan antara pertumbuhan industri pariwisata dengan perlindungan lingkungan, kesejahteraan sosial masyarakat dan keberlanjutan ekonomi dalam jangka panjang. Teori ini menekankan bahwa keberhasilan pariwisata tidak hanya diukur dari jumlah wisatawan atau pendapatan yang diperoleh, tetapi dari dampak jangka panjangnya terhadap lingkungan dan masyarakat lokal. Menurut World Tourism Organization, pariwisata berkelanjutan harus memperhatikan tiga dimensi utama, yaitu lingkungan, sosial-budaya dan ekonomi. Sementara itu, John Swarbrooke menegaskan bahwa pengembangan pariwisata harus dilakukan secara bertanggung jawab agar tidak menimbulkan kerusakan atau ketimpangan di masa depan.

1. Keberlanjutan Lingkungan

Pariwisata tidak boleh merusak ekosistem, mengurangi kualitas lingkungan, atau melebihi daya dukung kawasan. Pengelolaan sampah, konservasi air dan perlindungan alam menjadi bagian penting.

## 2. Pemberdayaan Masyarakat

Masyarakat lokal harus dilibatkan dalam pengelolaan destinasi, memperoleh manfaat ekonomi, serta memiliki peran dalam pengambilan keputusan.

## 3. Keberlanjutan Ekonomi Lokal

Pariwisata harus menciptakan peluang kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat dan mendorong pertumbuhan usaha lokal tanpa menciptakan ketergantungan berlebihan pada pihak luar.

Prinsip-prinsip pariwisata berkelanjutan berfungsi sebagai pedoman praktis dalam mengelola destinasi agar tetap berkembang tanpa merusak lingkungan, merugikan masyarakat, atau menciptakan ketimpangan ekonomi. Prinsip-prinsip ini juga dapat menjadi dasar analisis dalam menilai apakah suatu destinasi telah dikelola secara berkelanjutan atau belum

Dalam industri pariwisata, konsep daya dukung (*carrying capacity*) mengacu pada batas maksimum aktivitas wisata yang dapat diterima oleh suatu destinasi tanpa mengakibatkan kerusakan lingkungan, penurunan kualitas pengalaman wisatawan, atau gangguan terhadap kehidupan masyarakat lokal. Dalam teori pariwisata berkelanjutan, ide ini sangat penting karena membantu mengontrol pertumbuhan destinasi agar tidak terlalu banyak turis. Menurut *World Tourism Organization*, pengelolaan destinasi harus mempertimbangkan batas kemampuan lingkungan dan sosial agar pariwisata dapat berlangsung dalam jangka panjang. Berdasarkan penjelasan dasar-dasar pariwisata yang berkelanjutan, peneliti menyimpulkan bahwa pertumbuhan pariwisata tidak hanya bergantung pada peningkatan jumlah pengunjung atau keuntungan ekonomi; pengelolaan destinasi yang bertanggung jawab mempertimbangkan pelestarian lingkungan, kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan ekonomi di masa depan. Organisasi Pariwisata Dunia mengatakan bahwa pengelolaan pariwisata harus dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya secara efisien, mengurangi polusi dan limbah, menjaga keanekaragaman hayati, melibatkan masyarakat dan memiliki perencanaan pembangunan yang berfokus pada masa depan. Prinsip-prinsip pariwisata yang berkelanjutan berfungsi sebagai acuan untuk menilai apakah pengelolaan tempat wisata di Kota Tarutung telah dilakukan dengan cara yang berkelanjutan melalui langkah-langkah dan kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah daerah:

### 1. Kapasitas Fisik

Kapasitas fisik adalah jumlah maksimum pengunjung yang dapat diakomodasi oleh suatu tempat wisata berdasarkan ruang dan fasilitas yang ada pada waktu tertentu. Sebagai contoh: Luas kawasan wisata, jumlah tempat parkir, fasilitas toilet dan umum, serta kapasitas akomodasi. Jika jumlah pengunjung melebihi kapasitas yang ada, akan terjadi kemacetan, antrean yang panjang, serta penurunan kenyamanan bagi wisatawan.

### 2. Kapasitas Sosial

Kapasitas sosial berkaitan dengan sejauh mana masyarakat setempat dapat menerima kehadiran wisatawan dan aktivitas yang mereka lakukan. Artinya, meskipun secara fisik tempat tersebut masih dapat menampung wisatawan, jika masyarakat merasa terganggu (seperti oleh suara bising, perubahan budaya, atau konflik sosial), maka batas sosial telah terlampaui. Kapasitas sosial sangat penting untuk menjaga: Keberlangsungan hubungan antara wisatawan dan masyarakat, pelestarian nilai budaya lokal, serta stabilitas sosial di area tujuan wisata.

### 3. Kapasitas Lingkungan

Kapasitas lingkungan adalah kemampuan dari ekosistem untuk menerima aktivitas pariwisata tanpa menyebabkan kerusakan yang bersifat permanen. Contohnya adalah: Kemampuan tanah untuk mencegah erosi, ketersediaan sumber air bersih, daya tahan ekosistem terhadap pengaruh manusia dan pengelolaan limbah serta sampah. Jika batas ini dilampaui, konsekuensinya bisa berupa kerusakan hutan, pencemaran sumber air, kerusakan

terumbu karang, atau berkurangnya keanekaragaman hayati.

Dalam konteks Teori Pariwisata Berkelanjutan, pemerintah memegang peranan kunci sebagai pengatur, penghubung, sekaligus pengawas untuk memastikan bahwa pengembangan sektor pariwisata berlangsung seimbang antara aspek ekonomi, sosial dan lingkungan. Tanggung jawab ini sangat vital, terutama ketika suatu daerah memiliki banyak lokasi yang dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat. Pemerintah perlu merumuskan kebijakan serta sistem pengelolaan untuk menjamin keberlanjutan destinasi wisata dalam jangka panjang. Dalam kerangka teori kebijakan publik, kontribusi pemerintah dapat dipahami sebagai bentuk intervensi kebijakan untuk mengendalikan dampak yang ditimbulkan oleh pariwisata. Berikut adalah penjelasannya:

#### 1. Regulasi Lingkungan

Pemerintah berperan dalam merumuskan peraturan yang mengatur perlindungan terhadap lingkungan di area wisata. Regulasi ini dapat mencakup: Aturan pengelolaan limbah, batasan pembangunan di lokasi tertentu, analisis dampak lingkungan (AMDAL), serta pembatasan jumlah kunjungan (kuota wisatawan). Regulasi lingkungan bertujuan untuk menghindari eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan serta menjaga kapasitas daya dukung area tersebut.

#### 2. Pengawasan Aktivitas Wisata

Di samping menyusun peraturan, pemerintah juga perlu melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan wisata. Pengawasan ini mencakup: Memantau jumlah pengunjung, mengawasi pelaku usaha pariwisata, serta menerapkan sanksi apabila terjadi pelanggaran. Tanpa adanya pengawasan yang konsisten, kebijakan keberlanjutan akan menjadi sekadar tulisan tanpa adanya realisasi yang berarti.

#### 3. Penyusunan Rencana Tata Ruang

Perencanaan tata ruang memiliki peranan penting dalam menentukan zonasi destinasi wisata. Pemerintah harus menetapkan: Kawasan konservasi, zona komersial, area pemukiman, serta menentukan lokasi yang diperbolehkan dan yang dilarang untuk dibangun. Tata ruang yang baik dapat mencegah kepadatan berlebihan, konflik lahan, serta kerusakan lingkungan.

#### 4. Pendidikan dan Sosialisasi untuk Komunitas

Pemerintah mempunyai peran dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha mengenai pentingnya aspek berkelanjutan. Pendidikan dapat dilakukan melalui: pelatihan dalam pengelolaan pariwisata berkelanjutan, sosialisasi mengenai kebersihan dan pelestarian, serta pendampingan terhadap usaha lokal.

Pendidikan ini sangat penting agar masyarakat tidak sekadar menjadi objek kebijakan, tetapi juga berfungsi sebagai mitra aktif dalam menjaga keberlanjutan destinasi. Dengan beberapa indikator yang sering dipakai antara lain:

##### 1. Tingkat Keterlibatan Komunitas

Menilai seberapa dalam masyarakat lokal terlibat dalam proses perencanaan, pengelolaan dan pengambilan keputusan destinasi. Semakin tinggi tingkat keterlibatan, semakin besar kemungkinan tercapainya keberlanjutan sosial.

##### 2. Penyebaran Pendapatan Lokal

Menilai apakah keuntungan ekonomi dari pariwisata tersebar secara adil atau hanya dinikmati oleh kelompok tertentu. Keberlanjutan ekonomi ditandai dengan peningkatan pendapatan masyarakat lokal dan perkembangan usaha kecil.

##### 3. Kualitas Lingkungan

Termasuk kondisi air, pengelolaan limbah, kualitas tanah dan kebersihan area wisata. Penurunan kualitas lingkungan menjadi tanda bahwa kapasitas dukung sudah mulai terlampaui.

#### 4. Kepuasan Pengunjung

Kepuasan pengunjung mencerminkan kualitas pengelolaan destinasi. Jika pengunjung merasa nyaman tanpa merusak lingkungan, maka pengelolaannya bisa dianggap efektif.

#### 5. Tingkat Ketegangan Sosial

Menilai adanya konflik antara masyarakat, pemerintah dan pelaku usaha. Ketegangan yang tinggi menunjukkan bahwa prinsip keberlanjutan sosial belum dapat dicapai.

Indikator-indikator ini sangat krusial untuk memperkuat metodologi penelitian karena bisa menjadi dasar dalam pembuatan instrumen penelitian (seperti wawancara, observasi, atau kuesioner). Meskipun konsep keberlanjutan telah banyak diterapkan, pelaksanaannya sering kali menemui berbagai tantangan, di antaranya:

##### 1. Over Tourism

Peningkatan jumlah wisatawan yang tidak terkontrol dapat menyebabkan kepadatan, kerusakan lingkungan, serta penurunan kualitas pengalaman wisata.

##### 2. Perselisihan Kepentingan di Antara Stakeholder

Ketidakesesuaian kepentingan antara pemerintah, investor dan masyarakat sekitar seringkali menyebabkan kebijakan yang tidak seimbang.

##### 3. Minimnya Koordinasi Antar Lembaga

Pengelolaan tempat wisata yang melibatkan berbagai pihak memerlukan kerjasama yang solid. Tanpa adanya koordinasi, kebijakan dapat saling bertentangan atau menjadi tidak efektif.

##### 4. Ketidakmerataan Perkembangan di Berbagai Destinasi

Sebagian destinasi berkembang dengan cepat, sementara yang lain tertekan. Ini berpotensi menciptakan ketidakadilan ekonomi dan beban yang berlebihan pada destinasi tertentu. Penting untuk mendiskusikan tantangan ini agar penelitian tidak hanya berfokus pada teori ideal, tetapi juga pada kenyataan di lapangan.

Pariwisata memiliki potensi sebagai alat pembangunan jika dikelola dengan baik. Aspek-aspek yang berkaitan mencakup:

##### 1. Keseimbangan Ekonomi, Sosial dan Lingkungan.

Pariwisata seharusnya memberikan keuntungan ekonomi tanpa merusak lingkungan serta tidak mengorbankan nilai sosial dan budaya.

##### 2. Pengurangan Tingkat Kemiskinan

Pariwisata bisa menciptakan peluang kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat lokal dan mendukung pertumbuhan usaha kecil dan mikro.

##### 3. Pelestarian Budaya Lokal

Kegiatan pariwisata dapat berfungsi sebagai media untuk mempromosikan dan melestarikan budaya tradisional jika dikelola dengan penghormatan terhadap nilai-nilai lokal.

Dengan mempertimbangkan penjelasan tersebut, para peneliti percaya bahwa pariwisata berkelanjutan memegang peranan penting dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan, khususnya dalam peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat serta pelestarian lingkungan dan budaya lokal. Oleh karena itu, pengelolaan destinasi wisata perlu dilakukan dengan cara yang terencana dan beretika, agar manfaat dari pariwisata dapat dirasakan secara berkelanjutan oleh masyarakat tanpa menimbulkan dampak negatif pada lingkungan maupun nilai-nilai sosial budaya yang ada.

Teori Tata Kelola (Governance) Pariwisata menjelaskan bahwa pengelolaan destinasi wisata tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah tetapi melibatkan berbagai aktor yang saling berinteraksi, bekerja sama dan berbagi peran. Dalam konteks destinasi wisata yang melibatkan berbagai pihak, seperti Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara melalui Dinas Pariwisata dan Bappeda, pelaku usaha pariwisata, Pokdarwis, serta masyarakat lokal, pendekatan tata kelola (governance) menjadi sangat penting. Pengelolaan pariwisata di Kota

Tarutung tidak dapat dilakukan secara sepihak oleh pemerintah, melainkan membutuhkan koordinasi, kolaborasi, serta pembagian peran yang jelas antar pemangku kepentingan. Oleh karena itu, konsep collaborative governance relevan digunakan untuk menganalisis bagaimana proses kerja sama, pengambilan keputusan bersama, serta pembagian tanggung jawab dilakukan dalam rangka mewujudkan pariwisata berkelanjutan. Dalam konteks pariwisata, pendekatan yang sering digunakan adalah collaborative governance, yaitu model tata kelola yang menekankan kerja sama antara sektor publik, sektor swasta dan masyarakat dalam mengelola destinasi secara bersama-sama. Konsep ini banyak dikembangkan oleh Chris Ansell dan Alison Gash, yang menjelaskan bahwa collaborative governance adalah proses pengambilan keputusan bersama antara lembaga pemerintah dan pemangku kepentingan non-pemerintah untuk mencapai tujuan public.

Dalam pengelolaan destinasi wisata, collaborative governance mencakup:

1. Partisipasi Multi-Pihak

Melibatkan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara, Dinas Pariwisata, Bappeda, pelaku usaha pariwisata, Pokdarwis dan masyarakat lokal.

2. Pengambilan Keputusan Bersama

Kebijakan dan program tidak ditentukan sepihak, tetapi melalui musyawarah atau forum bersama.

3. Pembagian Peran dan Tanggung Jawab

Setiap aktor memiliki fungsi yang jelas, misalnya: Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara sebagai regulator melalui Dinas Pariwisata, unit pengelola destinasi sebagai pelaksana teknis, pelaku usaha sebagai penggerak ekonomi dan masyarakat sebagai penerima manfaat sekaligus penjaga lingkungan.

4. Transparansi dan Akuntabilitas

Pengelolaan keuangan, pembagian hasil, serta pelaksanaan program harus terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan temuan riset, dapat disimpulkan bahwa pemerintah Kota Tarutung telah menjalankan berbagai usaha dalam menopang pariwisata berkelanjutan melalui regulasi, pembangunan fasilitas wisata, promosi destinasi, serta pemberdayaan masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam menjaga lingkungan dan melestarikan budaya lokal juga menjadi aspek penting dalam mendukung keberlanjutan pariwisata. Akan tetapi, pengelolaan pariwisata masih menghadapi beberapa kendala seperti keterbatasan sarana, pengelolaan sampah yang belum maksimal dan rendahnya kesadaran sebagian masyarakat terhadap pentingnya pariwisata berkelanjutan. Maka dari itu, dibutuhkan kerja sama yang lebih baik antara pemerintah, masyarakat dan pelaku usaha agar pengembangan wisata di Kota Tarutung dapat berjalan secara terbaik dan berkelanjutan.

### **Saran**

Pemerintah daerah diharapkan dapat menaikkan pengawasan dan pengelolaan destinasi wisata, terutama dalam menjaga kebersihan lingkungan dan memperbaiki fasilitas pendukung wisata. Di samping itu, sosialisasi mengenai pentingnya pariwisata berkelanjutan kepada masyarakat perlu ditingkatkan agar kesadaran masyarakat semakin baik. Pelaku usaha dan masyarakat juga diharapkan dapat terus menjaga budaya lokal serta mendukung pengembangan wisata yang ramah lingkungan akibatnya pariwisata di Kota Tarutung dapat berkembang secara berkelanjutan dan menyajikan manfaat bagi masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alison Gash Chris Ansell, 'Collaborative Governance in Theory and Practice', *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18.4 (2007), 543–57.
- B. Bramwell, 'Governance, the State and Sustainable Tourism: A Political Economy Approach', *Journal of Sustainable Tourism*, 19(4–5), 459–477, 19.4–5 (2011) <<https://www.tandfonline.com/toc/rsus20/19/4-5>>.
- Christopher C. Hood, *The Tools of Government*, 1983.
- CHRS. Ashari, S.Sos., M.Si. and others, *Buku Ajar Kebijakan Publik*, 2024 <[http://www.repository.mediapenerbitindonesia.com/350/3/P\\_08\\_%28FINISH\\_LAYOUT%29\\_Buku\\_Ajar\\_KEBIJAKAN\\_PUBLIK.pdf](http://www.repository.mediapenerbitindonesia.com/350/3/P_08_%28FINISH_LAYOUT%29_Buku_Ajar_KEBIJAKAN_PUBLIK.pdf)>.
- CHRS. Ashari, S.Sos., M.Si. and others, *Buku Ajar Kebijakan Publik*, 2024 <[http://www.repository.mediapenerbitindonesia.com/350/3/P\\_08\\_%28FINISH\\_LAYOUT%29\\_Buku\\_Ajar\\_KEBIJAKAN\\_PUBLIK.pdf](http://www.repository.mediapenerbitindonesia.com/350/3/P_08_%28FINISH_LAYOUT%29_Buku_Ajar_KEBIJAKAN_PUBLIK.pdf)>.
- Database Peraturan, 'Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010 2025', 2011, p. LN. 2011 No. 125, TLN No. 5262, LL SETNEG: 50 HLM <<https://peraturan.bpk.go.id/Details/5183/pp-no-50-tahun-2011>>.
- Edward Inskeep, *Tourism Planning: An Integrated and Sustainable Development Approach*, 1991 <[https://books.google.co.id/books/about/Tourism\\_Planning.html?id=UPhOAAAAMAAJ&redir\\_esc=y](https://books.google.co.id/books/about/Tourism_Planning.html?id=UPhOAAAAMAAJ&redir_esc=y)>.
- Jr. Werner J. Severin & James W. Tankard, *Teori Komunikasi: Sejarah, Metode dan Terapan Di Dalam Media Massa*, 2001 <<https://onesearch.id/>>.
- Liputan6, 'Memahami Intervensi Adalah: Pengertian, Jenis dan Dampaknya' <<https://www.liputan6.com/feeds/read/5755346/memahami-intervensi-adalah-pengertian-jenis-dan-dampaknya>>.
- M.Si ABDAL, *KEBIJAKAN PUBLIK (Memahami Konsep Kebijakan Publik) Buku Daras*, 2015.
- M.Si Arafat, S.Pd.I., *KEBIJAKAN PUBLIK; TEORI DAN PRAKTIK*, 2023
- Richard W. Butler, 'The Concept of a Tourist Area Cycle of Evolution: Implications for Management of Resources', *The Canadian Geographer*, 25 (1980).
- Soesilo Zauhar, *Administrasi Publik (Universitas Negeri Malang (dulu dikenal sebagai IKIP Malang), 1996)* <<https://onesearch.id/Repositories/Library>>.
- United Nations Environment Programme and World Trade Organization, *Making Tourism More Sustainable: A Guide for Policy Makers*, 2005 <<https://wedocs.unep.org/handle/20.500.11822/8741>>.
- Widiansyah Anugerah, 'Apa Itu Intervensi? Pengertian, Tujuan dan Manfaatnya', 2025 <<https://localstartupfest.lokercepat.id/faq/apa-itu-intervensi/>>.